

RELASI ANTAR ETNIS TIONGHOA DAN MELAYU DALAM PEMILUKADA TAHUN 2013

(Studi kasus: Tanjungpandan, Belitung)

Nur Ulumi

20120520099

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Email: umi.nurulumi@gmail.com

ABSTRAK

Melayu dan Tionghoa merupakan masyarakat dominan dengan jumlah penduduk lebih banyak dibanding dengan etnis campuran lainnya. Pemilu 2013 menghasilkan suara berbanding tipis antara dua calon terkuat dari pasangan Tionghoa dan Melayu. Perbedaan 0,2 persen menyulut permasalahan terhadap minat pilih masyarakat Belitung yang didominasi suku asli Melayu dan bagaimana relasi atau hubungan antar masyarakat Melayu dan Tionghoa dalam pemilu 2013 di Tanjungpandan, Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan objek masyarakat (Melayu dan Tionghoa), tokoh masyarakat (Melayu dan Tionghoa), parpol pengusung dari dua calon pasangan terkuat PDIP/PKB (nomor urut 01) dan Golkar/Hanura (nomor urut 05). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang di peroleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial etnis yang ada di Belitung, didapat melalui tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Hasil dengan mengikuti aspek Kerjasama, Persaingan, Penghalang, dan Konflik didalamnya, memberikan hasil yang baik melalui hubungan yang masih terjaga keharmonisannya. Pemilu sempat memberikan jarak di antara berbagai pihak. Parpol (PKB) sebagai pengusung nomor satu tidak memberikan dukungan sepenuhnya terhadap salah satu calon yang diusungnya dengan alasan keagamaan dan sedikit unsur etnis, proses pemilu tetap berlangsung karena pertimbangan yang bijak dari PKB mengenai komitmen calonnya terhadap partai pengusungnya. Mengakhiri proses pemilu, suasana kehidupan sosial kembali terwujud damai seperti sediakala dan perpecahan atau jarak diantara masyarakat maupun pihak intim yang terlibat dalam pemilu tidak lagi diungkit untuk memperkeruh hubungan sehat antar etnis (masyarakat) yang ada di Belitung. Diharapkan adanya pemilu menciptakan hubungan yang lebih erat dan saling toleransi diantara masyarakat juga kehidupan sosial harmonis sebagai penduduk dengan ragam perbedaan akan selalu terjaga pada tempatnya. Upaya pendekatan oleh pemerintah terhadap dua etnis dominan yakni Melayu dan Tionghoa harus lebih maksimal dan efektif.

Kata kunci : Relasi, Etnis, Masyarakat, Pemilu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu di antara sedikit negara di dunia yang memiliki karakteristik sebagai negara multietnik. Di Indonesia diperkirakan terdapat 931 etnik dengan 731 bahasa. Ada etnis yang besar dan ada yang kecil. Etnis besar di Indonesia antara lain: Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bali, Minangkabau, Batak, Dayak, Bugis, dan Cina. Sebagai negara yang multietnis, tidak hanya bentuk fisik melainkan juga sistem religi, hukum, arsitektur, obat-obatan, makanan, dan kesenian orang Indonesia pun berbeda-beda menurut etnisnya.¹

Indonesia dikenal dengan ragam perbedaan hingga menjadi suatu keistimewaan salah satunya banyaknya perbedaan etnis dan biasanya akan dikaitkan dalam ranah perpolitikan. Contohnya dengan dilakukannya Pemilu atau sekarang lebih sering disebut Pilgub. Pemilihan kepala daerah adalah sebuah ajang demokrasi untuk mencari pemimpin yang mumpuni dan sah sesuai dengan kehendak “*stake holder*” yakni (masyarakat) yang mempunyai peran dan fungsi penting terhadap pemilihan kepala daerah.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Sebagai penduduk minoritas, masyarakat etnis Tionghoa mulai mampu beradaptasi dengan tidak menutup diri dalam hal bersosialisasi terhadap lingkungan baru dan penduduk asli. Masuknya keturunan etnis Tionghoa di Pulau Belitung tidak terlepas dari sejarah pada masa pendudukan Belanda-Jepang. Pada abad ke-17, Pulau Belitung menjadi jalur perdagangan dan merupakan tempat persinggahan kaum pedagang.

Masuknya etnis Tionghoa merupakan sejarah yang berkaitan dengan kondisi wilayah atau sumber daya alam di tanah Belitung yang kaya akan hasil alam yaitu “Timah”. Mereka sengaja didatangkan sebagai kuli tambang timah dan dipekerjakan untuk beberapa PT tambang yang sudah banyak tersebar di Belitung. Dengan melalui banyak proses, alasan dan kejadian mereka akhirnya banyak yang memilih menetap di Pulau Belitung dan banyak diantara mereka berjedoh dengan penduduk asli Pulau Belitung dan memiliki keturunan.

Belitung diperkirakan berasal dari daratan Malaka (Melayu), yang datang ke

1

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/2014/07/20/masalah-masalah-sosial-dalam-masyarakat-multietnik/> diakses tanggal 3 november jam 12.16

pulau Belitung pada abad ke-18. Sebelum kedatangan bangsa Melayu, pulau Belitung dahulunya dianggap kosong tidak berpenghuni. Segera setelah kedatangan bangsa Melayu, tradisi dan budaya Melayu berkembang, dan hari ini menjadi budaya mayoritas di pulau Belitung. Orang Belitung sendiri menyebut diri mereka “uang Belitung”.² kemudian masyarakat Babel dikukuhkan menjadi masyarakat Melayu.

Sebagai usaha untuk ‘memelayukan’ Babel, pemangku adat Bangka telah memberikan gelar ‘Datuk’ kepada Ketua DPRD, Gubernur, dan Direktur Utama PT Timah.

Pemilukada tahun 2013 melahirkan calon atau nama-nama baru salah satunya dengan kedatangan calon dari etnis Tionghoa. Tahapan pemilukada berdampak dengan hubungan relasi sosial dimasyarakat dengan ragam etnisnya, banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak. Pemilukada tahun 2013 menghasilkan suara berbanding tipis antara dua calon terkuat dari pasangan Tionghoa dan Melayu.

Perbedaan 0,2 persen menyulut permasalahan terhadap minat pilih masyarakat Belitung yang juga banyak

menaruh pilihannya terhadap pasangan nomor urut 01 (Tionghoa & Melayu) yang sebenarnya Belitung didominasi oleh penduduk Melayu sebanyak 75% juga tidak kalah terbesar kedua dari 20% penduduk Tionghoa dan sisa lainnya merupakan penduduk campuran.

Adanya calon dari Tionghoa ini berimbas terhadap relasi masyarakat, bagaimana sikap masyarakat terhadap calon atau nama baru yang berasal dari etnis Tionghoa. Masyarakat/penduduk etnis Tionghoa jarang sekali atau bahkan belum pernah melibatkan diri mereka terhadap kinerja pemerintahan maupun membangun daerah di Belitung dan pada tahun ini salah satu dari perwakilan mereka muncul untuk ikut serta terhadap pemilihan politik. Hal ini memberi gairah baru terhadap seluruh penduduk Belitung, melihat bagaimana dua etnis terbesar di Belitung bersaing mencapai kedudukan. Karena hal ini muncul relasi sosial yang berbeda dari kehidupan sehari-hari biasanya. Isu-isu, pro/kontra, dan ketegangan lainnya bermunculan. Inilah mengapa diangkat sebuah permasalahan untuk diketahui sebagai bahan penelitian pada skripsi ini.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan

² <http://www.wacananusantara.org/suku-belitung/> diakses pada tanggal 20 november 2015 pukul 12.19

judul **Relasi Antar Etnis Tionghoa Dan Melayu Dalam Pemilukada Tahun 2013 Di Tanjung Pandan, Belitung.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilukada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilukada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilukada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pemilukada Tahun 2013 di Tanjung Pandan, Belitung.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat maka lokasi penelitian berada di daerah Tanjungpandan, kota Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan objek masyarakat, tokoh masyarakat (Tionghoa dan Melayu), kemudian parpol pengusung dari dua calon pasangan terkuat PDIP/PKB (nomor urut 01) dan Golkar/Hanura (nomor urut 05). Teknik

pengumpulan data yang digunakan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

II. KERANGKA TEORI

1. Relasi Sosial

a. Pengertian Relasi Sosial

Pengertian Relasi Sosial, Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

Beberapa tahapan terjadinya relasi sosial yaitu:

- a) Zero Contact
- b) Awareness
- c) Surface
- d) Mutuality

Menurut Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan

membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial.³

b. Bentuk Relasi Sosial (Proses Sosial)

Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif adalah:

- 1) Kerja sama, ialah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih perorangan atau kelompok mengadakan kegiatan bersama guna mencapai tujuan yang sama.
- 2) Asimilasi, ialah berasal dari kata latin *assimilare* yang artinya menjadi sama. Definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu.
- 3) Akomodasi, definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada.

Bentuk-bentuk disosiatif terdiri dari:

- 1) Persaingan, adalah bentuk proses sosial dimana satu atau lebih individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi.
- 2) Penghalang (oposisi), berasal dari bahasa latin *opponere* yang artinya menempatkan sesuatu atau seseorang dengan maksud permusuhan.
- 3) Konflik, berarti suatu proses dimana orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.⁴

2. Politik Identitas Etnis

Politik identitas sendiri merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (*race thinking*), biofeminisme, dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama.

Politik identitas etnis dalam perkembangannya dewasa ini lebih banyak menampilkan diri dalam wacana politik kebudayaan. Politik identitas

³ Spradley dan McCurdy, 1975 dalam Ramadhan, 2009 : 11

⁴ Puspito, Hendro. 1992. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

sendiri merupakan proses yang lahir dari kegagalan modernitas untuk memenuhi janjinya. Agnes Heller menguatkan hal ini, bahwa politik identitas sendiri merupakan milik dari budaya massa dan erat kaitannya dengan revolusi kebudayaan yang terjadi pada era postmodern. Dengan demikian, politik identitas juga bisa dikategorikan dalam politik kebudayaan.

Politik identitas merupakan wacana baru dalam kajian ilmu politik. Secara singkat, politik identitas adalah politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika jender, feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara dasarnya berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan-pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan-persoalan politik karena perbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa.

3. Pemilukada

Pasca-dimasukannya Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan Pemilukada, kembali menguatkan peran dan

fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia.⁵

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan ditingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pemilukada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya.

a. Fungsi Pemiukada :

- 1) Sebagai sarana legitimasi politik
- 2) Fungsi perwakilan politik
- 3) Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah.
- 4) sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.

b. Tahapan pemilukada

Pelaksanaan Pemilukada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan – kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah :

⁵Tim Peneliti Perludem. 2011. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: IFES

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- d. Pembentukan Panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Selanjutnya tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan sesuai pasal 65 ayat 3.⁶ yaitu :

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
- c. Kampanye
- d. Pemungutan Suara
- e. Penghitungan Suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah / wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ciri-ciri bahasa, asal usul dan adat istiadatnya, orang Belitung dapat

digolongkan dalam kelompok besar suku bangsa Melayu, sehingga identitas mereka lebih tepat disebut Melayu Belitung. Masyarakat ini berdiam di Pulau Belitung, orang Melayu Belitung sendiri menyebut diri mereka Urang Belitung. Suku Melayu merupakan penduduk asli pulau ini.

Etnis Tionghoa umumnya merupakan keturunan imigran-imigran China yang masuk ke Belitung pada masa kolonial Belanda. Berdagang umumnya dilakukan oleh penduduk Belitung yang berasal dari keturunan Tiongkok (Cina).⁷

1. Tahap Pencalonan

a. Aspek Kerjasama Antar Etnis pada Tahap Pencalonan

- 1) Pasangan PasTti (PDIP dan PKB)
- 2) Pasangan LAJU (PDK, PKBIB, PNBKI, Barnas, PPRN, PNIM, PPDI, PBR dan Partai Buruh)
- 3) Pasangan KB (Demokrat, PAN dan PKPI)
- 4) Pasangan Tekad JH (Gerindra, PKS dan PDP)
- 5) Pasangan BESAER (Partai Golkar dan Hanura)
- 6) Pasangan LILLAH (PBB dan PPP)

⁶ *Ibid*

⁷ <http://belitunginfo.com/kebudayaan-masyarakat-belitung> diakses pada tanggal 2 juli 2016 (08.33)

Dari ke 6 pasangan calon dan parpol pengusung diatas yang menjelaskan proses pada tahap awal yaitu tahap pencalonan pada pemilihan kepala daerah, mengenai alasan masing-masing partai pengusung memberikan dukungan terhadap pasangan calon yang diusung dan proses pencalonan itu sendiri. Tahap ini tidak memiliki isu-isu, pro/kontra, maupun dilema politik lainnya sehingga tidak muncul atau tidak dapat dijelaskan bentuk relasi sosial yang berkaitan dengan isu, pro/kontra, pada proses pencalonan itu sendiri.

Dari 2 pasangan terkuat yang memiliki perbandingan suara tipis, mereka dipasangkan pada pencalonan bukan melalui program tetapi mereka lahir dari bentukan partai yang mengusung dan menciptakan visi/misi berdasarkan untuk kemajuan bagi daerah jika menang dan tidak mengaitkan etnis didalamnya untuk menciptakan masalah sosial di masyarakat.

b. Aspek Persaingan Antar Etnis pada Tahap Pencalonan

Dari beberapa masyarakat baik masyarakat dengan etnis Tionghoa maupun melayu pada tahap ini memilih pilihannya tidak bergantung dengan dipasangkannya calon-calon berdasarkan etnis, karena beberapa masyarakat tersebut lebih mengkonsernkan pilihannya terhadap kriteria individu atau calon perseorangan. Jadi persaingan pada tahap

pencalonan hanya difokuskan berdasar pilihan kriteria kandidat calon bukan karena etnis.

c. Aspek Penghalang Antar Etnis pada Tahap Pencalonan.

Tidak ada penghalang pada tahap pencalonan karena keputusan verifikasi dari KPUD sudah lolos dan juga dari sisi masyarakatnya tidak ada yang mempermasalahakan nama-nama kandidat yang mencalonkan diri beserta partai-partai sebagai pendukung dari masing-masing calon.

d. Aspek Konflik Antar Etnis pada Tahap Pencalonan

Pada tahap ini juga tidak muncul konflik, karena tahap pencalonan masih merupakan tahap awal yang belum muncul gesekan-gesekan atau issue-issue negatif untuk menjatuhkan calon kandidat. Pilkada tidak bisa dikaitkan dengan perbedaan etnis terhadap para peserta calon untuk dijadikan sebuah perpecahan/konflik. Urusan terhadap siapa memilih siapa ialah rahasia individu/personal masyarakat dengan alasannya karena masyarakat juga sudah pintar.

1. Tahap Kampanye

a. Aspek Kerjasama Antar Etnis pada Tahap Kampanye

- 1) Setiap lapisan masyarakat ikut serta jika ada sosialisasi atau kampanye dialogis yang dilakukan oleh calon-calon.

- 2) Masyarakat pasang spanduk di halaman rumahnya.
- 3) Kerjasama calon dan partai pengusung calon dengan tokoh masyarakat di desa-desa, memberi izin lokasi rumah/lapangan sebagai lokasi kampanye dialogis.

Pembuktian ini kaitannya dengan relasi antar etnis masyarakat Kota Tanjungpandan bahwa sikap terbuka, kontribusi dan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut ketersediaan atas lokasi Halaman, Lapangan, Kantor, Balai pada Desa bahkan Rumah warga sebagai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) juga sekaligus menjadi tempat sosialisasi berkampanye terbuka bagi setiap calon dan parpol pengusungnya melakukan kampanye dialogis.

Bentuk kerjasama masyarakat antar etnis pada tahap kampanye merupakan bentuk yang cukup aktif dari berbagai suku atau etnis yang ada pada masyarakat Tanjungpandan, memberi kontribusi atau bantuan terhadap berjalannya kegiatan pemilukada sebagai wujud sadar berkewarganegaraan atau menjadi pemula berpolitik yang baik.

Kemudian dari hasil wawancara kedua dengan masyarakat Tionghoa yang masih

mengenai kerjasama antar etnis pada tahap kampanye:

- a) Tidak adanya konflik merupakan bentuk proses kerjasama oleh masyarakat sama etnis maupun berbeda etnis.
- b) Kerjasama pasca kampanye, pada pencoblosan adanya kerjasama masyarakat yang memiliki usaha/berdagang, menutup aktivitas berjualan pada hari pencoblosan.

Berita diatas memberikan pembuktian mengenai hasil wawancara dengan realita pada suasana pemilu yang sedang berlangsung tiga tahun silam yang menggambarkan banyak masyarakat yang memiliki usaha berdagang pada Toko, Pusat Perbelanjaan Departement Store dan Pasar sebagian memilih membuka usahanya dan banyak pula diantaranya memilih menutup usahanya.

Hal tersebut memberikan keterangan relasi antara etnis yang sangat tanggap pasca kampanye, yakni hari pencoblosan 09 Oktober 2013 berbondong-bondong melakukan kewajiban atas kesadaran dan inisiatif dari banyak masyarakat.

b. Aspek Persaingan Antar Etnis pada Tahap Kampanye

Tionghoa (pengusaha) jadi sponsor dana kampanye.

Dalam membuktikan aspek persaingan antar etnis pada tahap kampanye diatas bahwa Tionghoa menjadi sponsor dana kampanye, seolah-olah memiliki kuasa dan memberi sikap sombong merupakan suatu bukti issue yang kebenarannya banyak disampaikan melalui beberapa lisan masyarakat dan untuk membuktikan kebenaran ini melalui sumber lainnya tidak ada sumber media massa yang persis menampilkan kebenaran issue/data diatas. Relasi etnis yang dapat digambarkan ialah munculnya bentuk-bentuk suatu dukungan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda baik dari kesukuan, perekonomian, status sosial/jabatan dan lainnya dari parpol dengan masyarakat dan sebaliknya, walaupun banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

1) Debat Visi Misi Kandidat

Persaingan yang muncul pada tahap kampanye ialah, masing-masing pendukung dari calon kandidat yang melakukan debat kampanye hadir untuk memberi dan meramaikan suasana debat kampanye.⁸

Pasangan terakhir, keenam (Yuslih Ihza M-Abdullah Ma'ruf) yang memiliki visi/misi yang sedikit memicu tanggapan dari salah seorang

⁸ <http://bangka.tribunnews.com/2013/09/22/visi-misi-kandidat-tanpa-dialog>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016 (22.34)

pejabat, pasangan ini mengatakan lebih terfokus kepada pengentasan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung dan secara umum, seluruh calon bupati dan wakil bupati Belitung memilih kesamaan, yakni ingin mensejahterakan masyarakat Belitung sehingga mampu berdaya saing dan bermartabat sebagai masyarakat "*Melayu Belitung*".

Ini sedikit memicu tanggapan bahwa sebenarnya semua warga ialah Masyarakat Belitung tidak membedakan Melayu atau etnis lainnya. Hal ini mengakibatkan sedikit kesenjangan antara Melayu dan Tionghoa, ini terjadi karena masih adanya pola pikir dari beberapa masyarakat bahwa Tionghoa masih merupakan masyarakat pendatang walaupun mereka sebenarnya sudah lama hidup dari lahir hingga beradaptasi dengan masyarakat pribumi.

c. Aspek Penghalang Antar Etnis pada Tahap Kampanye

1) Ancaman atau ejekan mengenai issue-etnis, menjelekkkan suku etnis asli dari Tionghoa. (Ejekan dan issue etnis berupa pernyataan dari lisan ke lisan).

a) "jangan milih Cina kalau gak mau kota kita jadi kota berbau budaya Cina (Melayu ke Tionghoa)",⁹

⁹ Hasil Wawancara Ibuk Yani (masyarakat Melayu), pada tanggal 16 mei 2016 (19:22)

- b) “sesekali boleh warga kita yang harus jadi pemimpin Bupati, jangan hanya dari Melayu saja karena kita sudah lama hidup berdampingan dan membangun Kota kita bersama-sama (Tionghoa ke Melayu)”.¹⁰

Adanya sikap kecemburuan dan ketakutan terhadap hal-hal baru oleh masyarakat dengan perbedaan keetnisan dalam memilih pemimpin untuk daerah, yang menimbulkan sikap sindiran atau ejekan terhadap beda etnis secara diam-diam atau terang-terangan melakukan penghinaan atau ejekan dari sama etnis terhadap (mereka) yang berbeda.

2) Money Politik

Isu money politik diatas tidak memberikan sumber data persis sebagai bukti terjadinya money politik. Walaupun demikian, himbauan dari ketua Bawaslu pada berita *bangkapos.com* “Waspadai Modus Baru Politik Uang” (kamis, 05 desember 2013) tersebut telah memberikan sumber berita yang merujuk dengan issue tersebut, bahwa telah terjadinya money politik di ke Provinsian Babel. Himbaun ini dimaksudkan untuk setiap masyarakat menghindari modus-modus money politik yang akan berdampak tidak baik bagi daerah dan masyarakat itu sendiri.

d. Aspek Konflik Antar Etnis pada Tahap Kampanye

Konflik konstruktif/kecil, berupa konflik berbentuk lisan dengan ejekan/sindiran (tentang agama, dan etnis) oleh antar etnis maupun berbeda etnis.

Anti cina ialah pemahaman sebagian masyarakat lama, cina merupakan warga pendatang dan berbeda dengan pribumi merupakan bentuk pemikiran yang masih dipercayai pada sebagian masyarakat Melayu sekarang. Cina kurang diterima memberikan kontribusi dalam pemerintahan dan mengurus daerah Belitung, namun seiring berjalannya waktu masyarakat Cina/Tionghoa perlahan banyak menunjukkan keberadaanya untuk masuk serta berperan pada pemerintahan dan terjun dalam dunia politik di daerah maupun provinsi Bangka Belitung.

2. Tahap Hasil Pemilihan

a. Aspek Kerjasama Antar Etnis pada Tahap Hasil Pemilihan

Masih terjalannya silaturahmi antar calon-calon yang kalah terhadap para relawannya dan masyarakat-masyarakat pendukung. Merupakan bentuk keterbukan sebagai warga sekaligus tokoh masyarakat Melayu di Desa setempat yang dituakan oleh warganya, tujuan silaturahmi oleh calon yang kalah bermaksud memberi ucapan terimakasih

¹⁰ Hasil Wawancara Pak Ahyen (Tokoh masyarakat Tionghoa), pada tanggal 11 juni 2016 (16:32)

telah mendukung dan memberikan hak pilihnya terhadap calon tersebut.

Berarti ini menunjukkan adanya relasi antar masyarakat dan terhadap tetuanya dan juga dengan para kandidat calon-calon tersebut.

b. Aspek Persaingan Antar Etnis Pada Tahap Hasil Pemilihan

- 1) Persaingan muncul pada hasil penghitungan suara, setelah hasil pengumuman calon yang menang.

Sebelum perhitungan hasil Pemilu dari KPUD bahwa telah muncul sikap saling klaim menang bahkan ada yang telah mengucapkan selamat kepada salah satu pasangan calon dimedia cetak lokal Belitung.¹¹ Ketua KPU bahkan meminta kepada kandidat calon Bupati Belitung tidak saling klaim menang, menurutnya opini yang terbentuk dapat mempengaruhi psikologi masyarakat.¹²

- 2) Munculnya Ketidakpercayaan Terhadap Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung.

Hal ini dapat dibuktikan melalui penyampaian Mosi tidak percaya yang disampaikan oleh 5 team pemenangan pemilukada Kabupaten Belitung Tahun 2013, yaitu: Tim pemenangan nomor urut 2 (LAJU), nomor urut 3 (KB), nomor urut 4 (JH), nomor

urut 5 (Besaer) dan nomor urut 6 (Lillah) yang menyatakan **Mosi tidak percaya terhadap Panwaslu Kabupaten Belitung.**

Hal diatas tidak memiliki kaitan dengan relasi antar etnis, tetapi tindak kecurangan atas laporan Mosi tidak percaya tersebut merupakan tindakan negatif dalam memperoleh kekuasaan dan merugikan setiap lapisan masyarakat lainnya.

c. Aspek Konflik Antar Etnis pada Tahap Hasil Pemilihan

- 1) Konflik perdebatan, (antara masyarakat) dalam satu keluarga dengan agama yang berbeda-beda,
- 2) Situasi tidak kondusif, lakukan upaya pencegahan memicu konflik Horizontal.

Upaya rekonsiliasi pada pembuktian nomor 2 diatas, untuk menghindari suatu kejadian yang buruk pasca pemungutan suara Pemilukada terhadap issue-issue terjadinya keretakan persatuan masyarakat Belitung dan Konflik Horizontal antar pendukung masing-masing kandidat.

Konflik yang muncul pada tahap hasil berupa perdebatan lisan dari salah satu keluarga dengan orang-orang didalamnya yang memiliki keyakinan perbedaan beragama satu sama lain. Setelah melakukan pencoblosan mereka terlibat adu lisan untuk membenarkan pilihan calon pemimpin atas kesukaan maupun agama yang dianut oleh salah seorang calon menurut

¹¹ bangka.tribunnews.com edisi jum'at 11 oktober 2013, diakses pada tanggal 12 agustus 2016 (21.08)

¹² bangka.tribunnews.com edisi jum'at 13 oktober 2013, diakses pada tanggal 12 agustus 2016 (21.56)

kesesuaian atas suku atau etnis yang mereka punya juga punya ini adalah sebagaimana kisruh yang terjadi di masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui relasi antar etnis dan kendala yang dihadapi oleh Tionghoa dan Melayu dalam Pemilu 2013 di Tanjungpandan/Belitung dapat disimpulkan bahwa:

1. Relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam pemilu 2013

Hubungan antar kedua etnis Melayu dan Tionghoa dalam pemilu 2013 berjalan harmonis meski sentimen dan opini negatif diantara keduanya belum hilang sempurna. Warga Tionghoa mengharapkan sikap toleransi antar penduduk untuk diberi kesempatan bisa dipimpin dari sama suku/etnisnya, sebaliknya Melayu tidak sulit menerima pemimpin daerah dengan etnis Tionghoa/Cina dengan ketentuan Islam sebagai agama yang dianut. Pemilu sempat memberikan jarak diantara berbagai pihak, meski demikian keadaan kembali seperti semula setelah pemimpin daerah (Bupati dan Wakil Bupati) ditetapkan.

2. Kendala oleh etnis Tionghoa dan Melayu dalam Pemilu 2013

a. Masyarakat kurang mengenal calon

Tidak setiap nama calon bisa segera dikenali oleh masyarakat, hanya nama-nama tertentu yang biasanya sudah akrab dengan telinga masyarakat.

b. Sosialisasi visi dan misi yang tidak menarik

Warga akan merasa tidak nyaman dan tidak akan bertahan lama hadir dalam sosialisasi jika tidak ada hal yang menarik untuk ditunggu pada acara penyampaian visi dan misi.

c. Sosialisasi pencoblosan tidak merata

Banyak diantara masyarakat dengan berbagai kendala tersendiri seperti baru pertama kali mencoblos, lupa caranya mencoblos, atau kendala lainnya, mereka (masyarakat) akan merasa terbebani jika tidak ada pembekalan cara mencoblos yang baik dan benar pada hari pencoblosan.

d. Elite politik dan politik uangnya

Bahayanya politik uang sebagai pemancing terhadap masyarakat untuk memilih dengan imbalan dan membudayakan sifat tidak jujur terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran dari berbagai kendala yang terjadi pada proses pilkada sebagai berikut:

1. Memaksimalkan upaya sosialisasi bagi peserta calon dan tim pengusung, dengan tidak memulainya pada saat ada kepentingan pilkada.
2. Perlunya evaluasi yang bijak setelah berakhir proses pilkada mengenai sosialisasi pencoblosan tidak merata, masyarakat kurang mengenal calon, sosialisasi visi/misi tidak menarik minat masyarakat dan kelemahan lainnya, guna menjadi acuan dan pembelajaran terhadap pilkada berikutnya.
3. Menciptakan metode, sikap taat aturan, dan sanksi hukum (wajib) bagi peserta pemilu jika melanggar komitmen. Kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan sistem dan aturan hukum pilkada serta kerjasama masyarakat tidak hanya aparat penegak

hukum yang harus bertanggung jawab dalam meminimalisir politik uang.

4. Pemerintah harus berupaya melakukan pendekatan secara berkala terhadap paguyuban-paguyuban dan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan menjadi pemimpin kelompoknya untuk tetap menciptakan kehidupan bermasyarakat yang ideal di Belitung.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergaulan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Transmedia Pustaka.
- Dahana, A. 20A13. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya.
- Suryadinata, Leo. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tim Litbang Kompas. 2004. *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*. Jakarta: Buku Kompas.
- Tim Peneliti Perludem. 2011. *Menata Kembali Pengaturan Pemilihan*. Jakarta: IFES

Jurnal

Simamora, Janpatar. *Mimbar Hukum*. Volume 23 Nomor 1, Februari 2011. *Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Skripsi

Firmansyah, Dedi. 2010. *Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu tahun 2005)*. Skripsi, Yogyakarta: Prodi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Adrian, FIKRI. 2013. *Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)*.

Website

www.portal.belitungkab.go.id.

www.bangka.tribunnews.com.

www.repository.uinjkt.ac.id.

www.belitunginfo.com.